

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada suatu daerah yang sedang melakukan sebuah pembangunan dapat terjadi ketimpangan yang merupakan sebuah fenomena yang lumrah terjadi. Sumber daya alam yang berbeda di lokasi geografis menyebabkan ketimpangan antar daerah. Problem ini menyebabkan setiap daerah memiliki perbedaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbedaan dalam proses pembangunan. Sehingga sangat wajar apabila ada yang tergolong maju dan ada daerah yang terbelakang pada suatu daerah. Terjadinya ketimpangan dapat ditimbulkan oleh adanya proses pembangunan di setiap daerah, seharusnya perlu diadakan evaluasi dalam menciptakan suatu kebijakan sehingga ketimpangan antar daerah tidak mungkin terulang lagi (Syafrizal, 2012).

Tidak hanya negara berkembang tetapi juga negara maju menghadapi masalah ketimpangan pendapatan. Di satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah seberapa besar atau kecil ketimpangan yang terjadi dan seberapa sulit untuk mengatasinya. Pembagian pendapatan absolut dan distribusi pendapatan nisbi adalah dua aspek distribusi pendapatan di beberapa negara.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga

diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar terciptanya pertumbuhan setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Pemerintah menjadi pihak yang mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan dan mengarahkan pembangunan dan membuat program guna mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik ekonomi maupun sosial. Namun, merupakan tanggung-jawab besar bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa 34 provinsi di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika pemerintah pusat tidak sepenuhnya mengontrol wewenang dan tugas mereka. Otonomi daerah berusaha mencapai pembangunan yang merata dengan menerapkan sistem desentralisasi.

Tujuan dari penerapan kebijakan otonomi daerah, bersama dengan kebijakan lain, adalah untuk meningkatkan keselarasan pembangunan antar wilayah. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di setiap wilayah, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk perbedaan dalam sarana serta prasarana dan sumber daya manusia, serta distribusi investasi yang tidak menyeluruh, yang menyebabkan beberapa wilayah tertinggal. Ini ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan tiap orang antar masyarakat di sebuah provinsi (Darzal, 2016).

Ketidaksamaan dalam bagaimana pendapatan didistribusikan antar masyarakat dikenal sebagai ketimpangan pendapatan. Ini ditunjukkan dengan fakta bahwa sebagian kecil masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh atau karyawan hanya menikmati sedikit dari pendapatan nasional (Djojohadikusumo, 1954).

**TABEL 1.1**  
**Indeks Gini Indonesia (%)**

<b>Tahun</b>	<b>Gini Ratio</b>
2015	0.408
2016	0.397
2017	0.393
2018	0.389
2019	0.380
2020	0.381

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indeks Gini, juga dikenal sebagai rasio Gini, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara komunitas. Angka indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin rendah atau merata, sementara angka indeks gini yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut meningkat. Adapun dalam Al-Quran menjelaskan mengenai distribusi pendapatan yang dimaksudkan bahwa agar harta tidak berputar hanya pada orang tertentu saja. Yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (QS Al-Hasyr:7).*

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan sedang sangat tampak. Pulau-pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi pemerintah, masih belum dapat mengatasi ketimpangan pendapatan. Karena luas pulau ini lebih kecil ketimbang pulau lain contohnya Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera, fokus ekonomi pulau jawa tampaknya kurang merawa dibandingkan dengan pulau lain. Namun, faktanya, pulau jawa masih bertanggung jawab atas 50% ekonomi Indonesia. Melihat pulau jawa lebih kecil daripada pulau lainnya dianggap tidak adil.

Pulau Jawa adalah pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Selain itu, kegiatan perekonomian di pulau-pulau Jawa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pusat ekonomi Indonesia masih berada di pulau jawa. Aktivitas ekonomi di pulau Jawa berkontribusi 58.5%, sedangkan pulau Sulawesi, Kalimantan, nusa Tenggara dan Bali masing-masing berkontribusi 86.2%, 2%, dan 3.2%, serta Papua

dan Maluku masing-masing berpartisipasi 2.5%. Nilai indeks gini di seluruh provinsi pulau jawa di atas 0.35, yang menunjukkan bahwa pusat ekonomi Indonesia masih berada di pulau.

Kedudukannya sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian pulau jawa tak menjamin kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh pulau. Berdasarkan banyak fenomena, masalah ketimpangan distribusi pendapatan yang sering terjadi di seluruh negara di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, sangat penting untuk dipelajari karena pada dasarnya setiap negara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menghasilkan pemerataan pendapatan dan secara langsung mengurangi ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ellza Alfya Rahma (2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan Panel Data Analisis. Hasil dari penelitian ini adalah variabel PDRB perkapita, IPM dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Sedangkan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Yenni Del Rosa dan Ingra Sovita (2016) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi

Pendapatan Di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini menggunakan data panel sebagai alat regresi. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan semua variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan karena nilai probabilitas F kurang dari 5% ( $0,0000 < 5\%$ ). Variabel bebas yang mampu menjelaskan variabel terikat hanya sebesar 78,59% sedangkan sisanya 21,41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Tunas Syilviarani (2017) yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2010-2015. Dalam penelitian ini menggunakan data panel sebagai alat analisisnya. Penelitian ini menemukan bahwa variabel seperti IPM, inflasi, Tingkat pengangguran, PDRB, serta UMR secara serempak memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa dari tahun 2010 hingga 2015. Hasil uji koefisien determinan menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 0.566813, atau 56.68%, menunjukkan bahwa variabel independen yang ada dalam model statistik, seperti inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, dan UMR, bertanggung jawab atas variasi Indeks Gini. Faktor-faktor tambahan yang tidak dimasukkan dalam model tersebut menyumbang 43,32% dari total, yang merupakan bagian dari total.

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA PERIODE 2016-2021**

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan pencarian informasi yang diperlukan agar masalah yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar dan lebih rinci. Batasan penelitian ini adalah:

1. Variabel yang digunakan yaitu : Ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel Dependen (Y), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (X1), Derajat Desentralisasi Fiskal (X2), Indeks Pembangunan Manusia (X3), dan Penanaman Modal Asing (X4).
2. Dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 digunakan sebagai tahun terakhir dari periode penelitian ini.
3. Dalam penelitian ini menggunakan data panel.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021?
2. Bagaimana pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021?
4. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021.
2. Guna mengetahui pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021.
3. Guna mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021.
4. Guna mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa periode 2016-2021.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi acuan untuk penelitian dan penulisan ilmiah lainnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa.

###### b. Bagi Pemerinta



Sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah maupun pusat sebagai rujukan dalam proses pembangunan di setiap daerah, serta diharapkan menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya.